

Bulan :

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|

2 0 2 1

SUBBAGIAN HUMAS



Tanggal :

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |

| | |
|--------------|----------------------|
| Media Cetak | |
| Media Online | Tribun News Banyumas |

Wilayah: Kabupaten Purbalingga

Genjot PAD di Akhir Tahun, Bupati Purbalingga Minta OPD Lakukan Rekomendasi BPK

<https://banyumas.tribunnews.com/2021/12/02/genjot-pad-di-akhir-tahun-bupati-purbalingga-minta-opd-lakukan-rekomendasi-bpk?page=all>

TRIBUNBANYUMAS.COM, PURBALINGGA - Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi berupaya terus menggenjot perolehan pendapatan asli daerah (PAD).

Tiwi, sapaan bupati, juga meminta seluruh jajaran OPD pengelola pendapatan segera melakukan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) usai melaksanakan audit kinerja optimalisasi PAD, beberapa waktu lalu.

Satu di antaranya, melakukan kajian terhadap potensi pendapatan daerah yang ada.

Hal itu merupakan upaya strategis dalam rangka menutup berkurangnya penerimaan dari pemerintah pusat akibat refocusing anggaran selama pandemi Covid-19.

Menurutnya, ada sejumlah rekomendasi BPK yang wajib dilakukan OPD pengelola pendapatan.

"Misalnya, dalam kita membuat target pendapatan atau target pajak tahunan belum ada kajian yang jelas sehingga saat target tidak tercapai, bisa diketahui apa penyebabnya."

"Mulai 2022 nanti, secara bertahap, kita lakukan kajiannya," ujar Bupati Tiwi saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Operasional Kegiatan (Rakor POK) di ruang rapat bupati, Rabu (1/12/2021).

Selain itu, OPD juga diminta memperbarui regulasi terkait pendapatan yang sudah mengalami offdate atau kedaluwarsa.

Pembaruan regulasi itu diperlukan agar tarif retribusi dapat dilakukan penyesuaian.

"Tarif retribusi, menurut BPK, wajib dilakukan kajian ulang setiap tiga tahun sehingga kita bisa melakukan penyesuaian tarif retribusi meski nantinya dilakukan secara bertahap," katanya dalam rilis.

Selain itu, Bupati Tiwi juga akan melakukan pengkajian terhadap sejumlah asset milik pemda yang selama ini belum maksimal dalam menyumbang pendapatan daerah.

Upaya-upaya itu nantinya akan menjadi dasar dalam rangka optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Tahun 2021 ini, hingga 29 November 2021, realisasi pendapatan Purbalingga baru mencapai Rp 93,8 miliar dari pagu pendapatan Rp 97,098 miliar atau 96,65 persen.

Meski demikian, sejumlah OPD telah dapat merealisasikan pendapatannya, bahkan melebihi target. Di antaranya, Dinrumkim (120,07 persen), DLH (105,09 persen), dan Dinnaker (199,33 persen).

Sejumlah OPD mengaku optimistis mampu merealisasikan target pendapatan yang telah dipatok, di akhir tahun anggaran.

Sedangkan Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata (Dinporapar), menjadi OPD terparah yang terkena dampak Covid-19 karena seluruh potensi pendapatannya, terkait dengan pembatasan bahkan penutupan even olah raga, pariwisata, dan hiburan. (Tribunbanyumas/jti)